



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

Nomor 5

Tahun 1993

Seri B

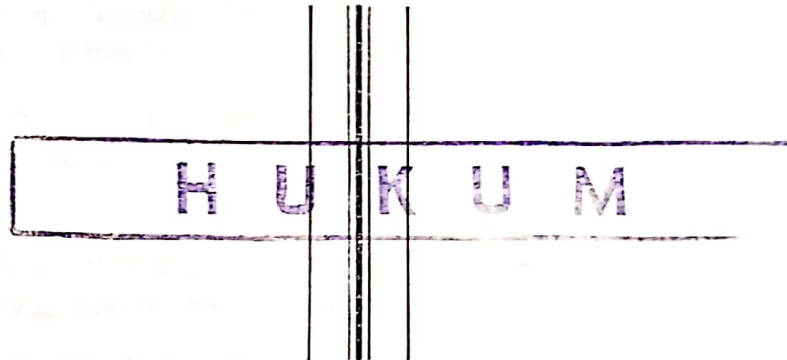
No. Seri 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

Nomor : 1 Tahun 1993

TENTANG

**RETRIBUSI TEMPAT PARKIR KENDARAAN
BERMOTOR**



BAGIAN HUKUM

Setwilda Tingkat II Hulu Sungai Selatan

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR: 1 TAHUN 1993

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PARKIR KENDARAAN BERMOTOR.

- Menimbang ; a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Retribusi Pemakaian Tempat Pemberhentian Kendaraan Bermotor (Tempat parkir) Diluar Termihal yang di sahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 15 Juli 1986 Nomor 011/SK-1/KUM dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 1986 Seri B Nomor 1 sudah tidak sesuai lagi dengan situ asi dan kondisi sekarang ;
- b. bahwa untuk maksud hurup a pada konsideran diatas dipandang perlu untuk menetapkan dalam suatu - peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pekek-
Pekek Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetap
an Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tem
tang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Per
aturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lin
tas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
6. Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang
Jalan ;

7. peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran Di Daerah.
- 10 . Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 1986 tentang Retribusi pemakaian tempat pemberhentian kendaraan bermotor (empat parkir)diluar Terminal ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.PW.07.03 Tahun 1989 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PARKIR KENDARAAN BERMOTOR .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- c. Kepala Daerah ; adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- d. Dinas LLAJ : adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkut an Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah : adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- f. Kendaraan Bermotor: adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada - pada kendaraan itu dan biasanya di pergunakan untuk mengangkut orang dan atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas rel ;
- g. Parkir : adalah penghentian kendaraan bermotor dan meletakkan ditempat parkir untuk waktu tertentu ;
- h. Tempat Parkir ; adalah suatu lokasi yang ditetapkan Kepala Daerah untuk parkir Kendaraan Bermotor ;
- i. Taman Parkir : adalah suatu wilayah dilingkungan - jalan-jalan penghubung umum, pusat - perdagangan yang dibatasi dan merupakan kawasan tertentu sebagai areal Tempat Parkir dalam Daerah ;
- j. Marka Parkir : adalah garis atau tanda yang menjadi batas dari parkir Kendaraan Bermotor yang sekaligus dapat memunjukkan cara parkir ;

- k. Retribusi : adalah kewajiban yang harus dibayar pemakai Kendaraan Bermotor dalam memasuki atau memarkir kendaraannya di lokasi parkir ;
- l. Kontribusi : adalah pembayaran iuran yang dilakukan oleh seseorang dan atau badan usaha selain Pemerintah Daerah yang mengusahakan parkir.

B A B II

PENGELOLA DAN PENYELENGGARAAN
TEMPAT PARKIR

pasal 2

- (1) Pengelola dan Penyelenggaraan Tempat Parkir dilakukan dan diawasi oleh Kepala Dinas LLAJ yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) pasal ini, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(
Pasal 3

- (1) Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk menetapkan tempat-tempat parkir dalam Daerah.
- (2) Lokasi dan jumlah Tempat Parkir ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada seseorang atau Badan usaha dan atau Instansi selain Pemerintah Daerah untuk mengelola Tempat Parkir diluar lokasi telah ditetapkan.
- (2) Seseorang dan Badan Usaha maupun Instansi selain Pemerintah Daerah yang akan menjalankan pengusahaan Tempat Parkir tersebut ayat(1) pasal ini, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.

- (3) Tata cara dan syarat -syarat pengajuan permohonan dalam rangka memberikan izin dimaksud ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap pengelola yang menjalankan perusahaan tempat parkir berkewajiban :
- a. Menempatkan papan pemberitahuan Lokasi Tempat Parkir yang dikelolanya dengan mencantumkan tarif retribusi parkir - serta nomor dan tanggal izin yang dimilikinya ;
 - b. Memberikan tanda pengenal kepada para petugas parkirnya.
- (2) Tanda pungutan retribusi parkir adalah berbentuk karcis yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kepala Daerah, yang didalamnya memuat biaya retribusi yang ditetapkan sesuai Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagian dari potongan karcis sebagaimana dimaksud ayat(2) pasal ini harus diletakkan pada Kendaraan Bermotor yang diparkir , sedangkan bagian lainnya diberikan pada pemakai kendaraan tersebut.

Pasal 6

Pengelolaan tempat parkir terutama petugasnya berkewajiban mengatur , menjaga dan memelihara terhadap kendaraan yang diparkir serta memiliki keterampilan dan mempunyai semua peraturan lalu lintas pada umumnya dan peraturan perparkiran pada khususnya.

Pasal 7

- (1) Petugas Tempat Parkir dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Dinas LLAJ dengan sepengetahuan Kepala Daerah.
- (2) Kepada petugas dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan upah pungut sebesar 10 % dari hasil yang harus disetor ke Kas Daerah.

B A B III

TATA TERTIB PARKIR

Pasal 8

- (1) Setiap pemakai Kendaraan Bermotor yang akan parkir, harus mematuhi semua rambu/marka/tanda - tanda atau petunjuk lainnya yang diberikan oleh petugas parkir.
- (2) Setiap jumlah Kendaraan Bermotor dilarang memarkir diluar - batas lokasi tempat parkir yang telah ditetapkan.
- (3) Dilarang parkir Kendaraan Bermotor pada jalan keluar masuknya kendaraan dilokasi Tempat parkir yang dapat merintang atau terganggunya kelancaran lalu lintas.
- (4) Pemakai Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih, dilarang - untuk parkir apabila mempergunakan badan jalan sebagai garasi kendaraannya.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas ILLAJ atau petugas yang ditunjuk berhak dan berwenang untuk menderok Kendaraan Bermotor apabila parkir tidak sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini atau mogok, sehingga - mengganggu kelancaran lalu lintas dan selanjutnya membawa ke tempat penyimpanan yang telah ditetapkan Kepala Daerah.
- (2) Kepada pemakai atau pemilik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakan kewajiban ;
 - a. Biaya menarik/ menderok kendaraan tersebut yang ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) perbuah²;
 - b. Biaya pemakaian tempat penyimpanan ditetapkan sesuai dengan tarif yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Setelah diadakan pengumuman atau pemberitahuan tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor tersebut untuk diambil ternyata - sampai 3 (tiga) bulan tidak diambil, maka kendaraan bermotor tersebut dianggap sebagai barang temuan oleh Pemerintah Daerah dan akan diselesaikan menurut prosedur sesuai ketentuan yang - berlaku.

B A B IV

RETRIBUSI TEMPAT PARKIR DAN
KONTRIBUSI

Pasal 10

Bagi pemakai kendaraan bermotor yang menggunakan Tempat parkir diwajibkan membayar retribusi Tempat Parkir, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan jenis Truck dan Bus dikenakan Rp. 400,-
- b. Untuk kendaraan Truck Mini dan Bus Mini dikenakan .Rp. 300,-
- d. Untuk kendaraan mobil Sedan, Pick Up atau sejenisnya Rp. 250,-
- d. Untuk kendaraan bermotor (roda tiga) sejenisnya ...Rp. 150,-
- e. Untuk kendaraan bermotor roda dua dikenakanRp.100,-

Pasal 11

- (1) Bagi pengelola Tempat Parkir yang diberikan izin sesuai pasal 5 Peraturan Daerah ini dikenakan Kontribusi.
- (2) Besarnya Kontribusi dimaksud ayat(1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk pengelola Tempat Parkir Umum dikenakan sebesar 30 % dari nilai nominal karcis yang berlaku sesuai pasal 11 Peraturan Daerah ini.
 - b. Untuk pengelola Tempat Parkir Khusus dikenakan sebesar 40 % dari nilai nominal yang berlaku sesuai pasal 11 Peraturan Daerah ini .
 - c. Untuk pengelola Tempat Parkir Insidentil dikenakan sebesar 40 % dari nilai karcis yang berlaku sesuai pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Hasil pungutan Retribusi Tempat Parkir maupun Kontribusi dimaksud pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini harus disetorkan ke - Kas Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, pasal 5, pasal 9, pasal 10, pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat(1) pasal ini adalah Pelanggaran.

B A B VI

PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak - pidana , penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud - dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang - un - dangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil karena kewajibannya mempunyai wewenang ;
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang ada - nya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan - memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari, memotret seseorang tersangka ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai ter - sangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk Penyidikan Umum bahwa tindak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada pemuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat ditanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemeriksaan rumah ;
 - c. Penyitaan benda ;
 - d. Pemeriksaan surat ;
 - e. Pemeriksaan saksi ;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian;
- dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 1986 tentang Retribusi Pemakaian Tempat Pemberhentian Kendaraan Bermotor (Tempat Parkir) diluar Termihal dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 21 Januari 1993

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan,
Ketua,

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan,

Cap. dtt.

cap. dtt.

S O E D A R N O .

H. MOH. ARLAN. SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan :

Nomor : 5
Pada tanggal : 8 Juni 1993
Tahun : 1993
Seri : 3
Nomor seri : B

Disahkan oleh Gubermur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan :

Tanggal : 7 Juni 1993
Nomor : 14 / SK-1 / KUM.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan,

Drs. H. Ideris Apsani.

Pembina TK.I

NIP. 010 041 008.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002